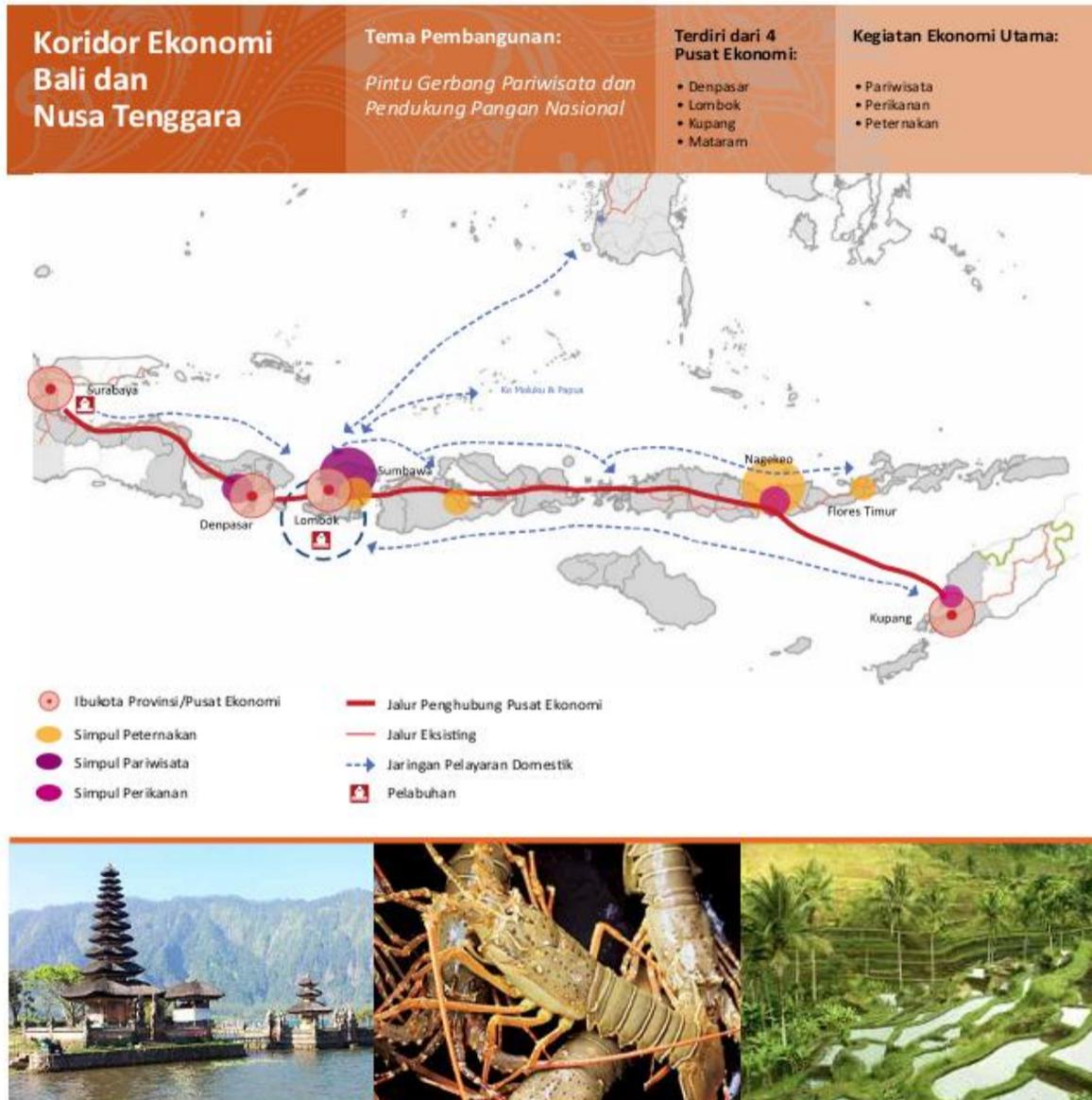




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -



F. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

1. Overview Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

Pengembangan Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tema Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di koridor ini yang mana 17 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan serta memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar IDR 47,2 juta per kapita (antara kabupaten/kota terkaya dan termiskin di dalam koridor ini). Namun demikian, Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara memiliki kondisi sosial yang cukup baik, sebagaimana terlihat dari tingginya tingkat harapan hidup sebesar 66 tahun, tingkat melek huruf sebesar 86 persen serta tingkat PDRB per kapita sebesar IDR 15 juta yang lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita nasional sebesar IDR 9,6 juta di tahun 2010.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, antara lain populasi penduduk yang tidak merata, tingkat investasi yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada tiga Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu: Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan. Gambar 3.F.1 menunjukkan kontribusi Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan yang tergambarkan dalam sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pertanian terhadap perekonomian di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gambar 3.F.1:

PDRB Provinsi Bali, NTB, NTT berdasarkan Sektor (2010)



Sumber: BPS, 2011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Dari gambar di atas diketahui bahwa Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan berkontribusi besar terhadap PDRB masing-masing provinsi yaitu sebesar 52 persen (Bali), 37 persen (NTB), dan 55 persen (NTT). Dengan rata-rata peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar tujuh persen per tahun selama lima tahun terakhir, ketiga Kegiatan Ekonomi Utama tersebut dapat berpotensi untuk menjadi mesin penggerak perekonomian di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.

Daya Dukung Wilayah

Air. Neraca air untuk Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara diindikasikan negatif atau mengalami defisit. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan air yang sangat rendah yaitu hanya 1,9 persen dan 0,3 persen dari total ketersediaan air permukaan tanah dan air tanah di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011). Selain itu, curah hujan tahunan yang sangat rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu hanya 1.500 mm/tahun, serta kondisi fisik lahan dan penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas ekonomi yang membutuhkan banyak air menjadi penyebab defisitnya kapasitas air. Energi .

Energi. Cadangan gas bumi di koridor ini hanya 4 TSCF atau 2,6 persen dari total cadangan gas nasional, sedangkan potensi energi terbarukan seperti air ataupun geothermal juga cukup kecil untuk dikembangkan, yang hanya memiliki kapasitas 626 MW untuk tenaga air dan 1.767 MW untuk geothermal. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012).

Kesehatan. Angka harapan hidup Bali cukup tinggi yaitu 70,72 tahun sementara angka harapan hidup untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya 62,1 tahun dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 67,2 tahun dimana keduanya berada dibawah rata-rata nasional. Selain itu, NTT dan NTB juga memiliki angka kematian bayi dan balita tertinggi di Indonesia. (Kementerian Kesehatan, 2011).

Lahan. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara memiliki daratan seluas 7,4 juta Ha, dengan 28 persen luas yang tersisa merupakan kawasan hutan. Terjadinya deforestasi antara 2006-2010 (16 persen dari total nasional) dan penggunaan lahan yang menyalahi peruntukannya mengakibatkan semakin bertambahnya lahan kritis di koridor ini yaitu mencapai 1.180.599 Ha atau sekitar 4,3 persen dari total lahan kritis di Indonesia. Walaupun terbilang sedikit, namun laju bertambahnya lahan kritis di koridor ini cukup tinggi yaitu 203 persen (2007-2011). (Kementerian Kehutanan, 2012).

a. Pariwisata



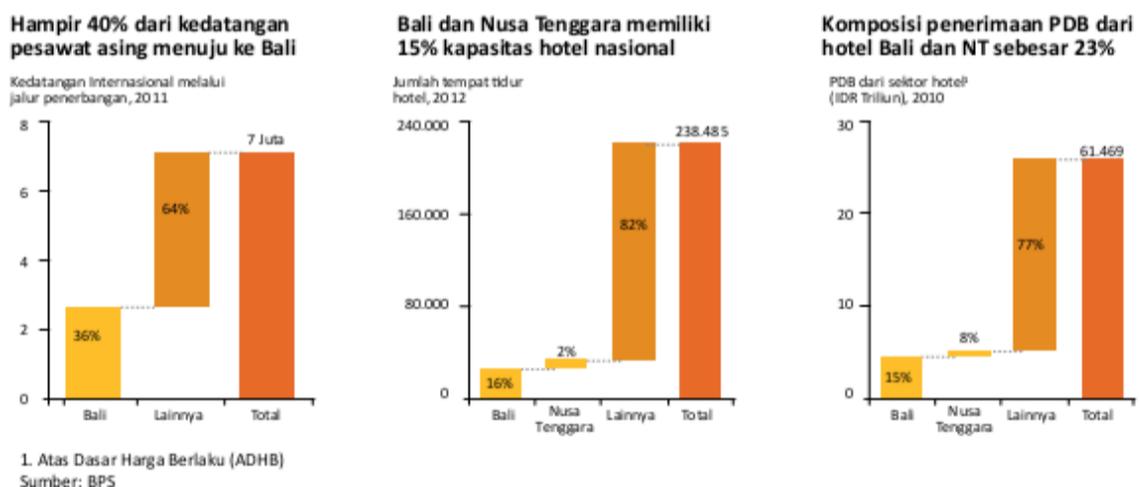
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Pembangunan kepariwisataan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara difokuskan pada 9 Destinasi Pariwisata Nasional. Sistem industri jasa memiliki peranan strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara serta berperan dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2011 berdampak pada nilai kontribusi pariwisata yaitu sebesar USD 8,55 Miliar dengan kenaikan dari tahun 2010 sebesar USD 7,6 Miliar. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) 2011 – 2025 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025, menargetkan kunjungan wisman mencapai 20 juta orang per tahun (skenario positif).

Gambar 3.F.2:

Pariwisata di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Penting Bagi Perekonomian Indonesia



Berdasarkan perspektif nasional, Bali merupakan pintu gerbang Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata di Indonesia. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2010, hampir 40 persen melalui Bali. Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama menerima hampir 3 juta pendatang setiap tahunnya. Kapasitas hotel di Indonesia sebesar 16 persen dan 23 persen dari pendapatan perhotelan nasional berada di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara. Secara nasional, pariwisata menyerap sekitar 6,87 persen tenaga kerja pada tahun 2010 dengan jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebesar 7,44 juta orang sebagaimana tampak pada Tabel 3.F.1.

Tabel 3.F.1:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

Kinerja Kepariwisata Indonesia 2011

Kinerja Kepariwisata Indonesia		
	DUNIA (2011)	INDONESIA (2011)
Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional (WISMAN)	983 juta	7,6 juta
Pertumbuhan Kunjungan dari Wisman	*4,6%	*8,5%
Pendapatan Pariwisata dari Wisman	USD 1,030 Miliar (2010)	USD 8,55
Tenaga Kerja Pariwisata	235 juta Lapangan Kerja	7,44 juta Lapangan Kerja

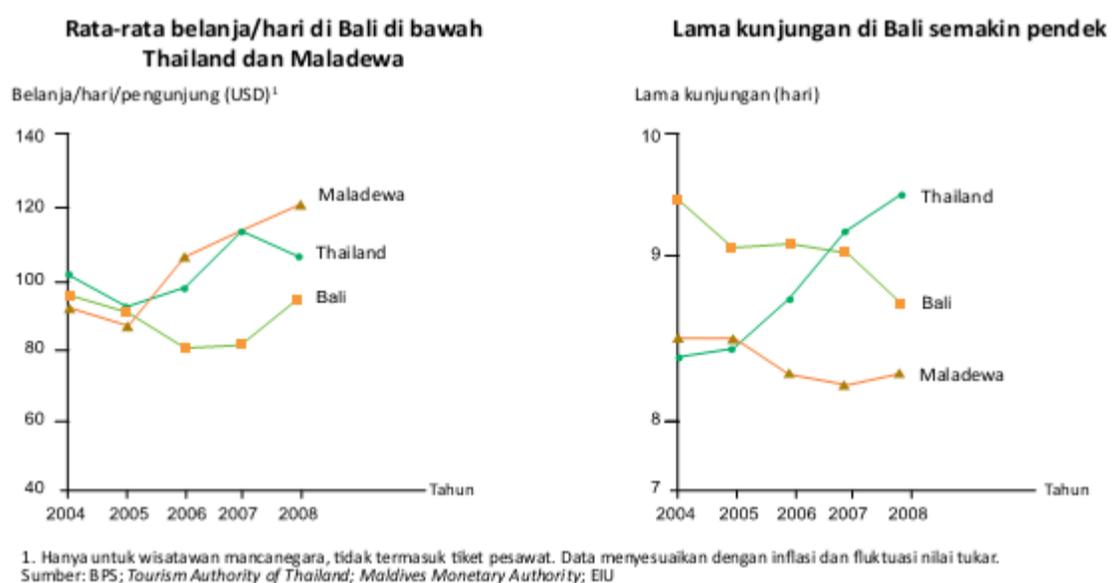
*berdasarkan data tahun 2010

Sumber : UNWTO dan LAK Kemenparekraf dan NESPARNAS

Bali sebagai pusat pertumbuhan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, juga memiliki tingkat pertumbuhan pariwisata yang stabil dan ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat, yaitu sebesar 1.668.531 orang (2007), 2.085.084 orang (2008), 2.385.122 orang (2009), 2.576.142 orang (2010), 2.826.709 orang (2011), dengan rata-rata tingkat hunian hotel lebih dari 60 persen. Bali memiliki jalur penerbangan nasional ke berbagai destinasi Indonesia dan penerbangan internasional dari dan ke Bali dalam jumlah yang memadai sehingga Bali mempunyai kemampuan sebagai pintu gerbang sekaligus pusat distribusi pariwisata di Indonesia. Tantangan pariwisata di Bali yang dapat dilihat dari rata-rata belanja wisatawan/hari di Bali yang di bawah Thailand dan Maladewa serta menurunnya rata-rata lama kunjungan wisatawan di Bali seperti diperlihatkan di dalam Gambar 3.F.3.

Gambar 3.F.3

Tantangan Pariwisata di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Tabel 3.F.2

Data Pariwisata Bali dan Nusa Tenggara terhadap Pariwisata Indonesia

DATA	Satuan	2009		2010	
		Bali – Nusa Tenggara	INDONESIA	Bali – Nusa Tenggara	INDONESIA
Jumlah Kunjungan Wisman <i>Direct</i>	Orang	2.436.409	6.323.730	2.597.889	7.002.944
		38,53%	100%	37%	100%
Rata-rata Pengeluaran Per Kunjungan	USD	1.353,26	995,93	1.581,84	1.085,75
		135,88%	100%	146%	100%
Rata-rata Pengeluaran Per Hari	USD	105,67	129,57	151,30	135,01
		82%	100%	112%	100%
Rata-rata Lama Tinggal	Hari	13,19	7,69	10,66	8,04
		172%	100%	133%	100%

Keterangan:

Data sementara tahun 2010 kunjungan wisman *direct* ke Bali dan Nusa Tenggara melalui Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padang Bai, Benoa, Bandara Selaparang dan Pelabuhan Benete, Bandara El Tari, lintas batas Atambua, Pelabuhan Maumere dan Kupang.

Sumber: P2DSJ Kemenbudpar dan BPS

Beberapa strategi umum untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan selama berkunjung ke Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, antara lain:

- 1) Meningkatkan keamanan di dalam Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, antara lain melalui penerapan sistem keamanan yang ketat;
- 2) Melakukan pemasaran dan promosi yang lebih fokus dengan target pasar yang lebih jelas. Strategi pemasaran untuk setiap negara asal wisatawan perlu disesuaikan dengan menerapkan tema "*Wonderful Indonesia, Wonderful Nature, Wonderful Culture, Wonderful People, Wonderful Culliner, dan Wonderful Price*". Kegiatan pemasaran dan promosi ini diharapkan dapat membuat Bali menjadi etalase pariwisata dan meningkatkan citra Bali sebagai tujuan utama pariwisata dunia;
- 3) Memberdayakan *Bali Tourism Board* untuk mengkoordinasikan usaha pemasaran dan promosi Bali;
- 4) Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Bali Utara dalam rangka meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan dan lama tinggal wisatawan;
- 5) Meningkatkan destinasi pariwisata di luar Bali (*Bali and Beyond*) dengan menjadikan Bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia seperti wisata pantai (Bali, Lombok, Sumbawa, NTT), wisata budaya (Bali), wisata pegunungan (Jatim, Bali, Lombok, Sumbawa), dan wisata satwa langka (Pulau Komodo). Kunci sukses dari strategi ini adalah dengan pengadaan akses seperti peningkatan rute penerbangan ke daerah-daerah pariwisata di sekitar Bali, yang disertai pemasaran yang kuat dan terarah;

- 6) Meningkatkan kualitas dan kenyamanan tinggal para wisatawan dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti ketersediaan air bersih, listrik dan transportasi serta komunikasi; dan
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal terutama SDM pariwisata di NTB dan NTT, serta mengembangkan gerakan sadar wisata khususnya di wilayah Nusa Tenggara.

Gambar 3.F.4:
Penciptaan Jaringan Kluster Pariwisata dengan
Penambahan Rute Penerbangan



Selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, faktor lain untuk meningkatkan pendapatan Kegiatan Ekonomi Utama ini adalah meningkatkan jumlah pembelanjaan wisatawan. Perubahan pola ekonomi dunia juga mempunyai dampak pada pariwisata daerah. Oleh karena itu, pemerintah dan industri pariwisata harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengeksplorasi pasar-pasar baru yang bisa mendorong laju pertumbuhan pariwisata di masa mendatang. Peningkatan citra kepariwisataan dan pengembangan kepariwisataan up market pada koridor ini adalah menjadikan Bali sebagai destinasi wisata utama MICE, *cruise* dan *yacht* serta Nusa Tenggara sebagai etalase wisata ekologis, petualangan, budaya, dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM.

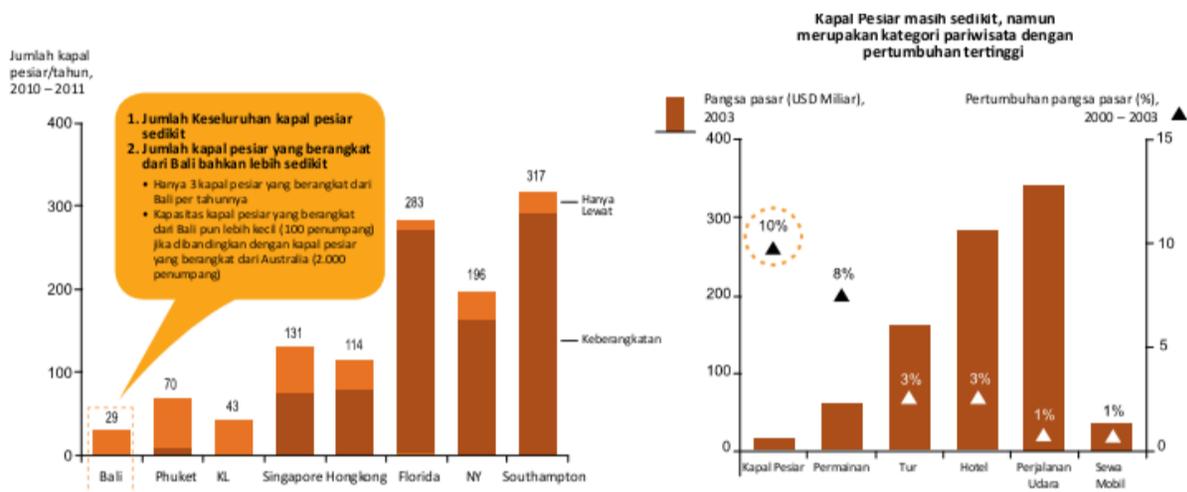


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Gambar 3.F.5

Pertumbuhan Pangsa Pasar Kapal Pesiar di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara



Sumber: Euromonitor; Mintel; analisis ekuitas (Goldman, UBS); Airlines Business Magazine; companies' 10-K, 6-K, annual reports; analisis Tim

1) Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan strategi umum tersebut, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan berikut:

- Kemudahan perluasan pemberian *Visa Entry*, *Visa on Arrival*, dan *Visa on Board* bagi wisatawan mancanegara serta perpanjangan visa bagi pengguna kapal layar yacht asing;
- Pengembangan standar pembangunan terminal cruise dan marina sekaligus sebagai *port of entry*;
- Mempermudah pemberlakuan CAIT (*Clearance Approval for Indonesian Territory*) bagi wisatawan asing pengguna kapal layar yacht;
- Mengurangi/menghilangkan biaya impor sementara bagi pelaku asing wisata bahari (kapal layar yacht yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara);
- Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) percepatan perizinan dan penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk semua perizinan untuk pengembangan kawasan wisata;
- Pendekatan dengan pemerintah daerah setempat untuk berkoordinasi mengenai perizinan dan kebijakan pembangunan kawasan wisata; dan
- Mempermudah prosedur bagi calon investor untuk menanamkan investasi di wilayah Indonesia.



- 221 -

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, dilakukan melalui:

- a) Peningkatan kapasitas dan pelayanan bandar udara, seperti pengembangan bandar udara di Lombok yang dapat diberdayakan sebagai “matahari kembar” selain Bandara Ngurah Rai (untuk membagi beban lalu lintas penumpang yang ada di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, karena jumlah pengunjung yang akan masuk ke koridor ini diproyeksikan akan melebihi kapasitas Bandar Udara Ngurah Rai, pada tahun 2020);
- b) Peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur jalan;
- c) Peningkatan akses jalan perlu ditingkatkan untuk menghubungkan daerah-daerah pariwisata di wilayah Bali, NTB, dan NTT;
- d) Pembangunan Kereta Api Wisata Lingkar Bali (dalam rencana jangka panjang);
- e) Peningkatan pelabuhan dan marina yang telah ada agar memenuhi standar (kapal cruise dan kapal layar yacht);
- f) Peningkatan pembangunan waduk dan SPAM atau sumberdaya air bersih untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
- g) Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik bagi Bali dan Nusa Tenggara.

3) SDM dan IPTEK

Dalam rangka mendorong kemajuan Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, dilakukan beberapa hal melalui pengembangan SDM dan IPTEK, antara lain:

- a) Memberikan bantuan pengadaan peralatan SMK Seni, Kerajinan, dan Pariwisata;
- b) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara; dan
- c) Memberikan pembekalan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mendukung pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, seperti pengelola desa wisata, pengelola hotel, serta melakukan pemantauan pengembangan SDM pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

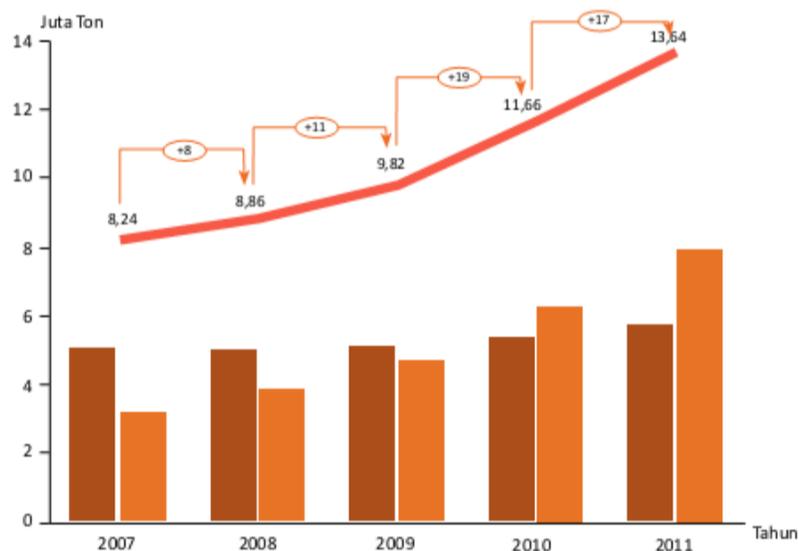
- 222 -

b. Perikanan

Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dikembangkan guna menuju ketahanan pangan nasional. Produk perikanan merupakan sumber protein hewani dengan tingkat konsumsi terbesar di Indonesia dengan besaran konsumsi produk perikanan mencapai sebesar 31,6 kg/kapita/tahun yaitu 73 persen konsumsi protein hewani/kapita/tahun, dibandingkan sumber protein hewani lainnya seperti ayam, daging, dan telur. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangat mendukung pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan. Indonesia memiliki akses sumber daya perikanan yang berlimpah baik perikanan perairan laut maupun air tawar dimana terdapat 5.500 sungai dan danau dan 76 persen luas permukaan Indonesia merupakan perairan laut.

Gambar 3.F.6

Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2007-2011



Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan, 2011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Tabel 3.F.3

Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2007-2011

PRODUKSI PERIKANAN	Tahun		Kenaikan Rata-rata (%)
	2010	2011	
Perikanan Tangkap	5.384.418	5.714.271	6,13
Perikanan Laut	5.039.446	5.345.729	6,08
Perikanan Umum	344.972	368.542	6,83
Perikanan Budidaya	6.277.924	7.928.963	26,30
Budidaya Laut	3.514.702	4.605.827	31,04
Tambak	1.416.038	1.602.748	13,19
Kolam	819.809	1.127.127	37,49
Karamba	121.271	131.383	8,34
Jaring Apung	309.499	375.430	21,30
Sawah	96.605	86.448	-10,51
Total	11.662.342	13.643.234	16,99

Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan, 2011

Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perkembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan di Indonesia memiliki kenaikan rata-rata per tahun sebesar 16,99 persen. Pada periode 2010 – 2011, produksi perikanan budidaya meningkat 26,30 persen dengan produksi terbesar diperoleh dari budidaya di kolam. Peningkatan ini lebih tinggi dari produksi perikanan tangkap yang meningkat 6,13 persen.

Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan juga mencakup produk kelautan, misalnya seperti rumput laut dan garam. Produksi rumput laut nasional pada tahun 2011 mencapai 4,5 juta Ton. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara juga terdapat 12 kabupaten yang menjadi lokasi untuk pengembangan komoditas unggulan rumput laut sebagaimana tercantum dalam program Minapolitan 2010 – 2014. Kondisi geografis Indonesia yang potensial untuk pengembangan produksi garam, saat ini Indonesia harus melakukan impor garam guna memenuhi kebutuhan domestik. Tahun 2009 – 2010, impor garam untuk konsumsi masyarakat Indonesia meningkat tajam sebesar 500 persen. Peningkatan besaran impor garam dapat dilihat pada Gambar 3.F.7.

Pemerintah tengah menerapkan usaha untuk meningkatkan produksi garam dengan membentuk kawasan minapolitan garam. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi NTT sebagai wilayah pengembangan komoditi garam karena wilayah ini memiliki lahan potensial produksi garam yang luas. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, dengan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan saat ini menyumbang 16 persen PDRB dari sektor agrikultur pangan.



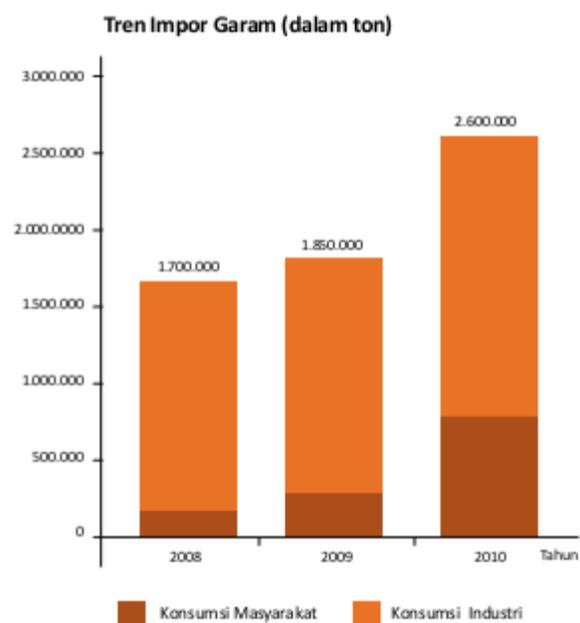
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Berdasarkan data dari Pusat Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor (IPB), saat ini Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan hanya menggunakan kurang dari 25 persen potensi kelautan di Indonesia. Peningkatan produktivitas hasil kelautan dapat dikembangkan bukan hanya melalui penangkapan, tetapi juga melalui pengembangan budidaya. Potensi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya yang besar tersebut terutama terdapat di daerah NTB. Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan perlu dikembangkan karena kegiatan tersebut berpotensi menjadi mesin penggerak perekonomian Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara melalui eksternalitas yang besar dalam penyediaan lapangan kerja.

Gambar 3.F.7

Perkembangan Impor Garam Indonesia Tahun 2008 – 2010

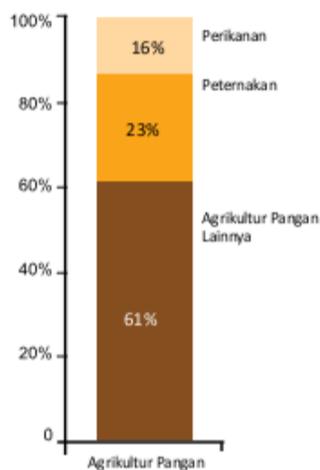


Sumber: Kementerian Perindustrian, 2010

Gambar 3.F.8

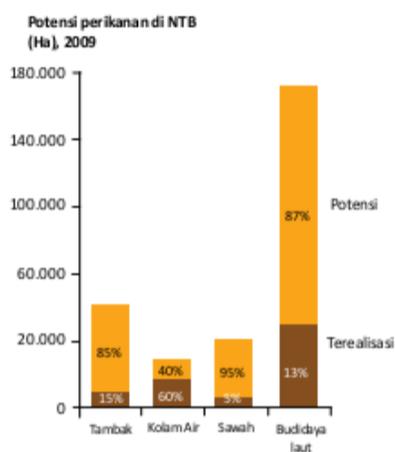
Kegiatan Perikanan Memiliki Potensi Besar di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

Komposisi Sektor Perikanan dan Sektor Peternakan di dalam PDRB Agrikultur Pangan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, 2010

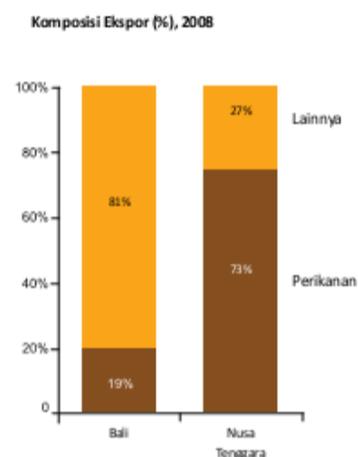


Sumber : BPS, diolah

Potensi perikanan yang belum dimanfaatkan masih sangat tinggi



Perikanan juga merupakan salah satu penggerak ekspor



Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu penangkapan/budidaya, pengolahan, dan distribusi hasil pengolahan perikanan. Terdapat beberapa tantangan yang berkaitan dengan tiga aspek pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan di atas, antara lain:

1. Tidak terpetakannya potensi perikanan kelautan secara akurat serta lemahnya kontrol implementasi rencana tata ruang yang menyebabkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. Terbatasnya suplai perikanan laut sehingga membutuhkan efisiensi produksi melalui pengembangan bibit unggul perikanan;
3. Sebagian besar armada dan peralatan penangkapan ikan masih sangat sederhana;
4. Rendahnya minat investor untuk pengembangan perikanan, terutama dalam kegiatan pengolahan produk perikanan dan kelautan;
5. Rendahnya nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan kelautan;
6. Rendahnya kualitas SDM perikanan dan kelautan, baik dalam produksi penangkapan dan budidaya perikanan serta dalam pengolahannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

7. Terbatasnya permodalan untuk masyarakat setempat sehubungan dengan pengembangan kegiatan perikanan berbasis masyarakat;
8. Terbatasnya jalur distribusi dan pemasaran produk perikanan dan olahannya;
9. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung (antara lain jalan, air bersih dan listrik) terutama untuk melayani industri pengolahan produk perikanan kelautan. Hal ini menyebabkan tingginya biaya produksi perikanan dan produk olahannya; dan
10. Minimnya akses yang menghubungkan antara lokasi-lokasi penghasil produk perikanan kelautan dengan lokasi industri pengolahannya serta dengan pasar regional dan fasilitas ekspor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi umum dan langkah aksi yang akan dikembangkan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara adalah:

1. Meningkatkan produksi hasil perikanan , yang meliputi penangkapan tuna, budidaya udang, dan budidaya rumput laut. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi perikanan yang sangat besar, oleh karena itu untuk meningkatkan produksi perikanan perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi:
 - a. Pemetaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan;
 - b. Pengawasan penerapan RTRW;
 - c. Pembentukan pusat benih;
 - d. Revitalisasi tambak yang sudah ada;
 - e. Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi; dan
 - f. Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan.
2. Meningkatkan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi hasil perikanan, yang meliputi pembekuan udang, pengalengan ikan, pengolahan tepung ikan, dan pengolahan keraginan (tepung rumput laut). Nilai tambah produk olahan perikanan pada saat ini masih sangat kecil. Peningkatan nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan dapat dilakukan dengan:
 - a. Pengembangan klaster industri perikanan yang melingkupi industri produksi bahan baku;
 - b. Penjalinan kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

- c. Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema micro credit PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan.
3. Meningkatkan produksi garam dengan mengoptimalkan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan usaha garam. Pengembangan industri garam merupakan kegiatan prioritas saat ini karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestik dan masih mengandalkan impor garam. Upaya untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri, sentra garam akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1) Regulasi dan Kebijakan

Pelaksanaan strategi umum guna peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:

- a) Persiapan dan pengawasan pelaksanaan RTRW;
- b) Kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya;
- c) Penjalinan kerjasama antara industri garam dengan pembudidaya garam setempat dalam penyediaan bahan baku industri garam;
- d) Mempermudah perizinan dalam pembangunan industri garam maupun produk pengolahan perikanan; dan
- e) Mengadakan kerjasama antar negara dalam penanaman investasi khusus Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, dilakukan melalui:

- a) Perbaikan level of service jalan lintas kabupaten, terutama untuk wilayah NTT dan peningkatan akses dari dari dermaga pendaratan ikan ke jalan lintas kabupaten terdekat;
- b) Peninjauan kembali kapasitas pelabuhan setempat guna mendukung aktivitas industri;
- c) Percepatan program penambahan kapasitas energi listrik dengan peningkatan kapasitas PLTU/PLTP;
- d) Percepatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih terutama di wilayah NTT untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

- e) Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan rakyat, terminal peti kemas bagi perikanan tangkap;
- f) Peningkatan akses jalan bagi distribusi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya kepada konsumen; dan
- g) Percepatan dalam pengembangan pelabuhan untuk kapal pesiar (sebagai contoh di Lembar-Sekotong).

3) SDM dan IPTEK

Upaya peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, dilakukan melalui:

- a) Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi;
- b) Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan;
- c) Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema *micro credit* PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan;
- d) Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang bernilai jual lebih tinggi (kualitas lebih baik);
- e) Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan teknologi budidaya garam (agar tidak tergantung pada cuaca);
- f) Pendirian pusat pelatihan budidaya garam dengan skala layanan kabupaten untuk diseminasi teknik dan kemungkinan integrasi penggunaan lahan tambak garam dengan budidaya perikanan;
- g) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara;
- h) Membuat berbagai pelatihan yang lebih spesifik untuk mendorong Kegiatan Ekonomi Utama Perikanan, seperti: kewirausahaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), pelatihan PUGAR (Pusat Usaha Garam Rakyat), pelatihan penangkapan ikan, pelatihan perawatan kapal ikan, dan pelatihan kewirausahaan permesinan;
- i) Mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut, seperti: pelatihan penanaman bibit rumput laut P2MKP, pengelolaan pasca panen rumput laut, serta pelatihan pemasaran dan pengelolaan usaha rumput laut; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

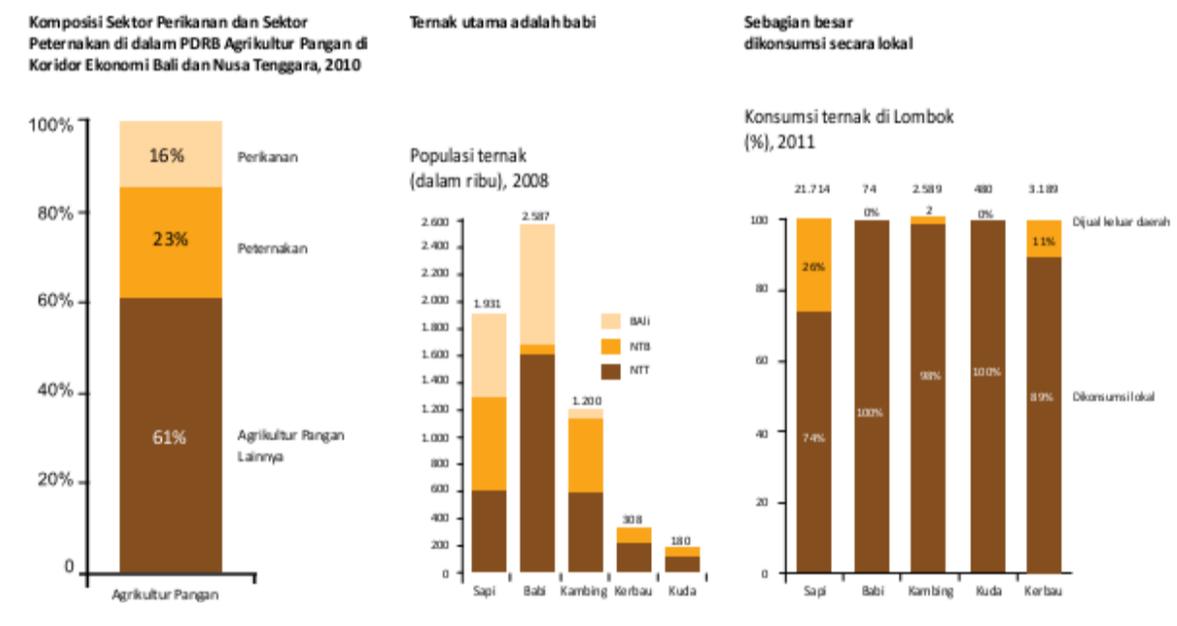
- j) Mengadakan pelatihan mengenai cara memulai ekspor untuk mendukung upaya perluasan pasar.

c. Peternakan

Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan berkontribusi terhadap PDRB sekitar 23 persen dari sektor agrikultur pangan pada Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara. Sebagian besar populasi ternak di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara masih dikonsumsi secara lokal dan hanya dipasarkan ke provinsi lain dalam jumlah sedikit.

Gambar 3.F.9:

Hasil Kegiatan Peternakan Sebagian Besar Masih Dikonsumsi Secara Lokal



Sumber: Tim Analisis, diolah

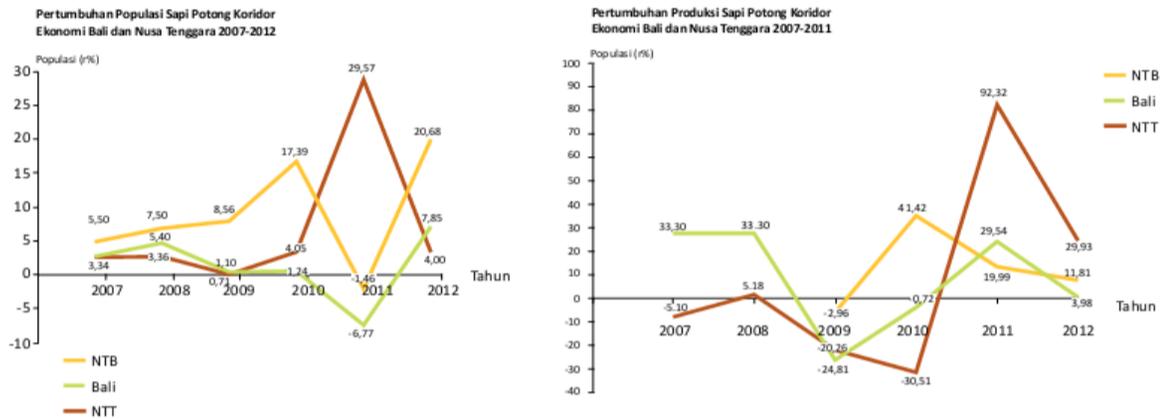


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

Gambar 3.F.10

Pertumbuhan Populasi dan Produksi Ternak Sapi Potong di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara



Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2012

Jenis populasi ternak yang paling potensial dikembangkan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara adalah Sapi Bali yang sudah dikenal luas sebagai sapi potong asli Indonesia dan populasi ternak babi. Sapi potong dapat dikembangkan untuk menghasilkan tujuh jenis emas, yaitu emas merah (daging), emas putih (susu), Peternakanemas putih batangan (tulang), emas kuning (urin), emas coklat (kulit), emas biru dan emas hijau (kotoran). Urin sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan energi biogas.

Pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Nusa Tenggara Timur cukup pesat dari tahun 2010 hingga tahun 2011, namun hal yang serupa tidak terjadi di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan produksi sapi potong di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan di tahun 2011. Penurunan produksi ini diakibatkan maraknya pemotongan sapi betina produktif, penyelundupan sapi, maupun penurunan kualitas bibit sapi itu sendiri. Tantangan terbesar dalam pengembangan kegiatan peternakan juga meliputi terbatasnya infrastruktur yang dapat mendukung distribusi produk ternak sapi, kurangnya modal usaha dan lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.

Saat ini terdapat sentra pemurnian dan pembibitan Sapi Bali di tiap provinsi yang umumnya dikelola secara individual. Tingginya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan, diharapkan pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan ini akan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara ke depannya.

Gambar 3.F.11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Strategi Percepatan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara



Sumber: Paparan Gugus Tugas Bali Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian, 2011, diolah.

1) Regulasi dan Kebijakan

Pelaksanaan strategi pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan industri hilir dengan meningkatkan nilai tambah ternak sapi potong, yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk yang memanfaatkan kulit, tulang, darah, kotoran, dan urin melalui penguatan industri kecil;
- Memberikan perlindungan usaha ternak dengan kebijakan pengurangan impor daging secara bertahap dan kebijakan pengendalian harga daging yang atraktif dan terjangkau;
- Menyediakan daging dengan kualitas ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal);
- Mengembangkan kebijakan usaha tani sapi-tanaman yang terintegrasi (*integrated rice-livestock system*) dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan prinsip *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA), atau pendekatan *zero waste* yang menghasilkan produk 4F (*Food, Feed, Fertilizer & Fuel*);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

- e) Memberikan jaminan tata ruang untuk lahan peternakan dan lahan penggembalaan ternak;
- f) Mempermudah akses finansial bagi peternak melalui penguatan koperasi simpan pinjam;
- g) Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti melakukan pemotongan sapi betina produktif;
- h) Memutus rantai makelar daging dan melindungi produsen ternak; dan
- i) Meningkatkan pasokan daging lokal dengan program swasembada daging.

2) Konektivitas (Infrastruktur)

Selain itu juga diperlukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung produksi peternakan, yang dilakukan melalui:

- a) Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan peternakan melalui PPP;
- b) Penguatan jalan untuk mengangkut produk peternakan dari sentra industri pengolahan daging dan non daging ke pelabuhan lokal terdekat;
- c) Penguatan pelabuhan lokal terdekat untuk mengangkut dan memasarkan produk ternak sapi ke wilayah lain terutama Jakarta dan Surabaya. Pelabuhan laut Marapokot di Kabupaten Nagekeo akan dikembangkan untuk mendistribusikan hasil peternakan dan perikanan;
- d) Difungsikan untuk mengangkut produk peternakan dan perikanan;
- e) Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara;
- f) Penyediaan air bersih untuk menjamin ketersediaan pakan ternak terutama pada musim kemarau khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara;
- g) Peningkatan fasilitas pelabuhan laut (seperti peningkatan faspel Bima, NTB); dan
- h) Percepatan pembangunan PLTU dan PLTA guna memenuhi kebutuhan energi bagi produksi peternakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

3) SDM dan IPTEK

Upaya peningkatan produksi dan pengembangan peternakan dilakukan melalui:

- a) Menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan teknologi pakan murah untuk pemenuhan kebutuhan daging lokal dari produksi dalam negeri;
- b) Mengembangkan teknologi untuk perbaikan mutu bakalan melalui metode inseminasi buatan, embrio transfer atau rekayasa genetika dalam waktu panjang;
- c) Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri, padat karya produktif, dan padat karya infrastruktur untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan di beberapa wilayah di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara;
- d) Membuat berbagai pelatihan dan pendampingan kelompok peternak, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan hewan, agribisnis hewan ternak, inseminasi buatan, dan teknologi hasil peternakan; dan
- e) Beberapa pelatihan lain di Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan yang terkait dengan dukungan lingkungan antara lain: teknis penyuluh biogas, pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas, dan pupuk organik.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara akan difokuskan pada pengembangan kawasan agribisnis dengan industri utama pengolahan daging sapi (*food animal industry*) dan industri pendukung yaitu industri tepung tulang, kulit, pupuk organik dan biogas (*non food animal industry*). Produk peternakan tidak hanya dikonsumsi secara lokal, namun didistribusikan ke konsumen di wilayah lain.

d. Kegiatan Ekonomi Lain

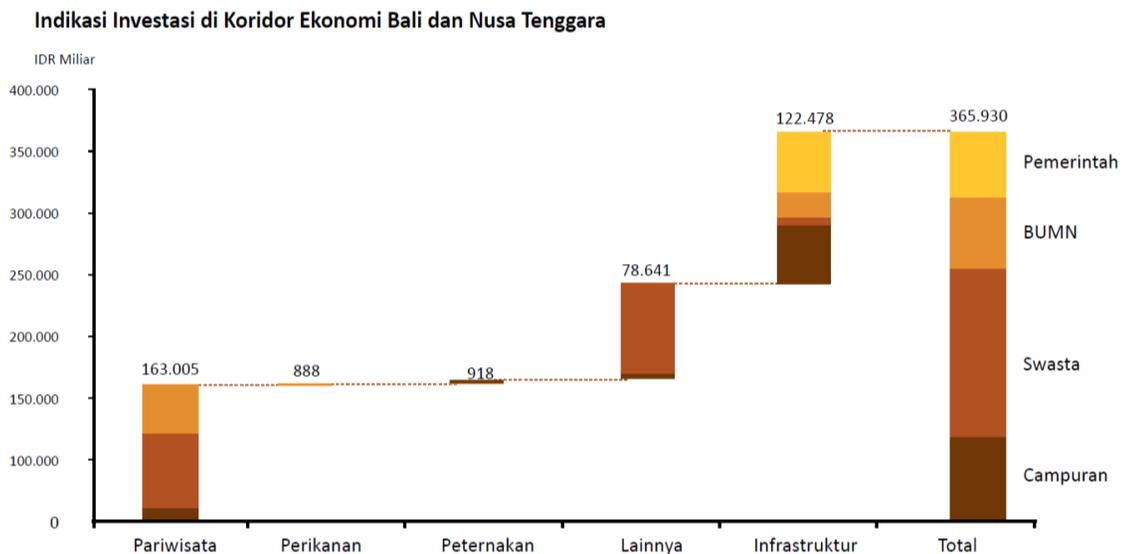
Selain Kegiatan Ekonomi Utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara di atas, kegiatan ekonomi lainnya di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti mangan, tembaga, dan minyak dan gas bumi. Beberapa kegiatan ekonomi lainnya secara menyeluruh berkontribusi besar dalam Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.

2) Investasi

Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara teridentifikasi rencana investasi baru untuk Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Perikanan, Peternakan serta Infrastruktur pendukung sebesar IDR 365.930 Miliar.

Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara:

Gambar 3.F.12:
Indikasi Investasi di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara



Sumber: Analisis Tim, 2013

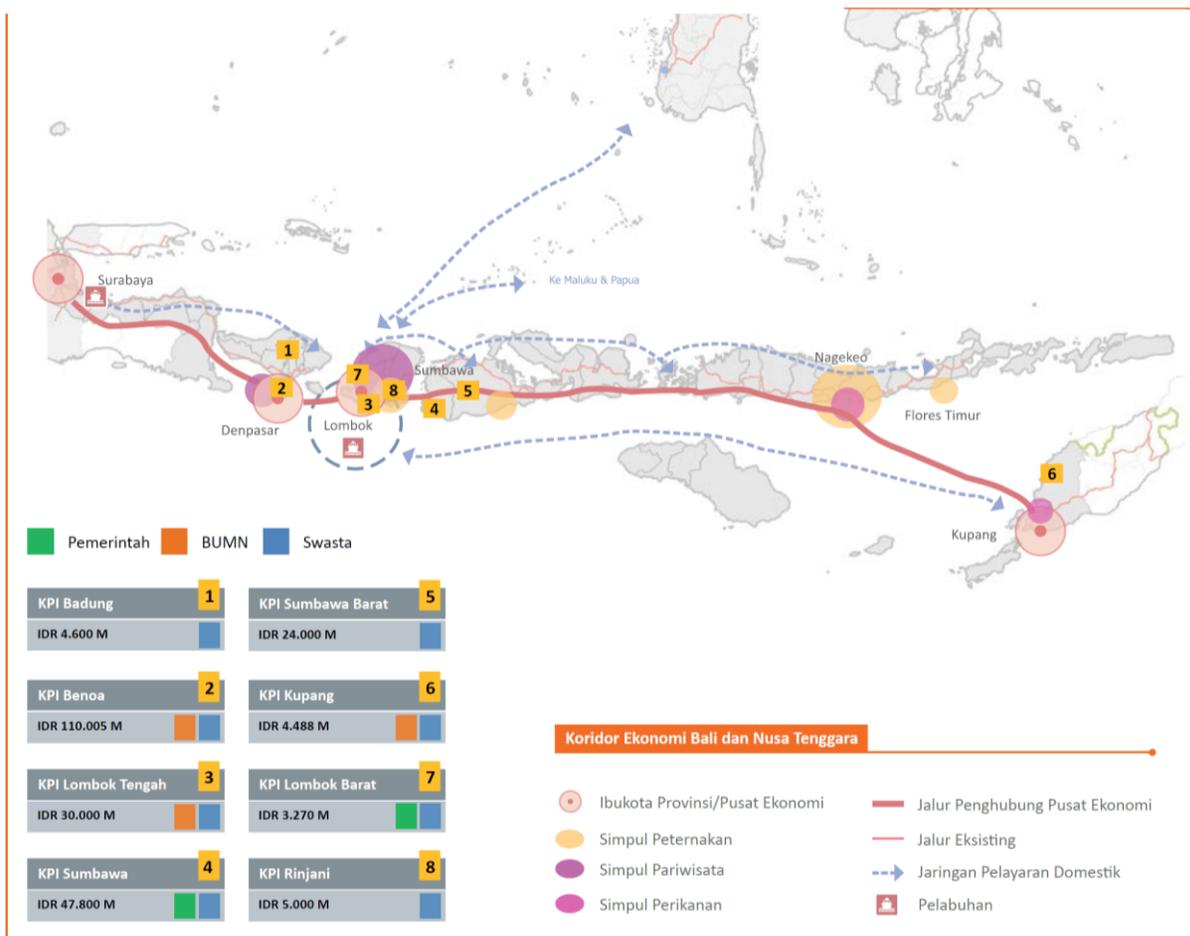
Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi Kegiatan Ekonomi Utama di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, tetapi menjadi bagian dari 22 Kegiatan Ekonomi Utama yaitu Tembaga dan Migas serta kegiatan ekonomi lainnya (mangan) dengan jumlah investasi sebesar IDR 78.641 Miliar. Inisiatif investasi yang berhasil teridentifikasi tersebut dihimpun dari dana pemerintah, swasta, dan BUMN serta campuran dari ketiganya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Gambar 3.F.13
Peta Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Prioritas
Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara

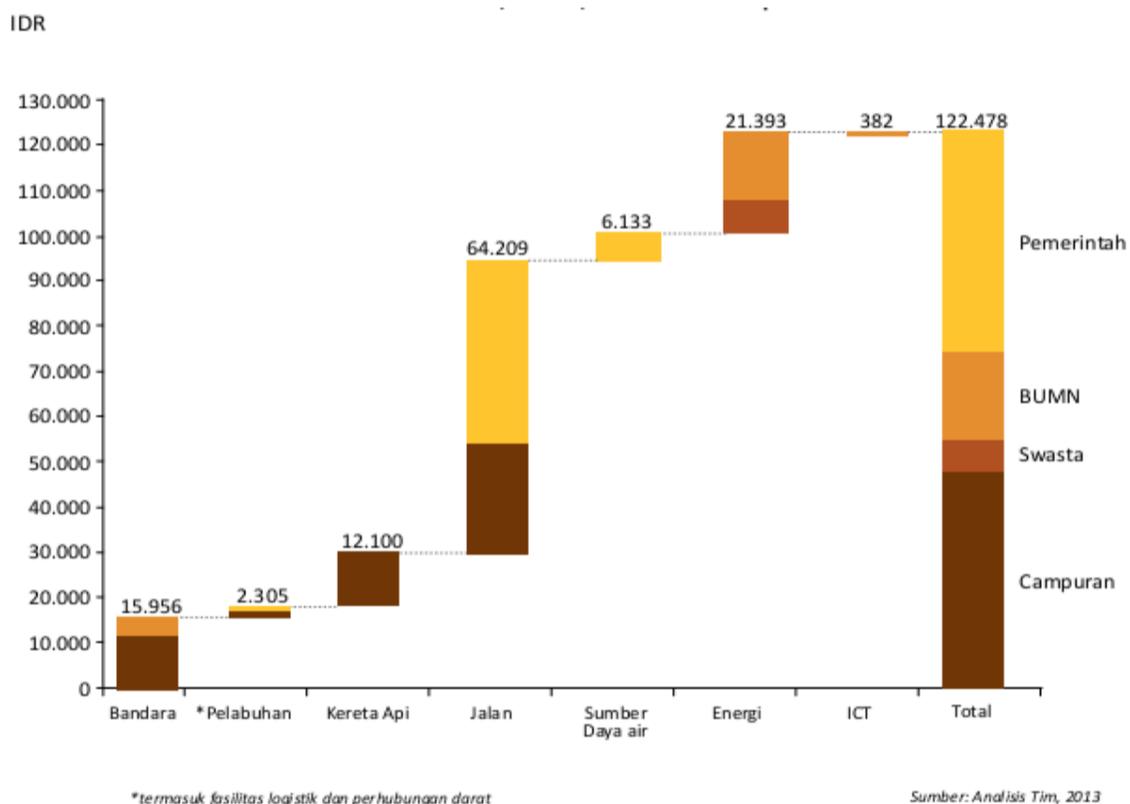




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Gambar 3.F.14
Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah,
BUMN, Swasta dan Campuran



Dalam jangka panjang, kegiatan kepariwisataan di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara merupakan pendorong pembangunan ekonomi di Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara melalui diversifikasi produk wisata, perluasan kawasan pariwisata dan pengembangan daya saing destinasi pariwisata secara berkelanjutan, maupun pengembangan pangsa pasar dengan daya beli tinggi. Pengembangan destinasi pariwisata dalam koridor ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur sepanjang Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.

Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Peternakan secara konsisten akan diupayakan melalui pengembangan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas bibit sapi, pengintegrasian kegiatan peternakan, dan tanaman pangan untuk menjamin sumber pakan ternak, pengembangan industri pengolahan daging dan non-daging (industri kulit, industri tulang, industri biogas, dan industri pupuk organik), dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan pelabuhan laut untuk mendistribusikan hasil produksi peternakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Pengembangan produktivitas perikanan laut memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan populasi ikan melalui penjalinan kerjasama untuk pengembangan bibit unggul dan teknologi perikanan tangkap dan budidaya serta teknologi pengolahan produk perikanan. Selain itu pengembangan infrastruktur dan fasilitas penunjang sangat penting dalam pengembangan kegiatan perikanan. Kegiatan hilir peternakan dan perikanan, seperti pengolahan daging dan pengalengan ikan maupun industri makanan lainnya, secara konsisten akan didukung pemerintah melalui penyediaan infrastruktur fisik maupun insentif/disinsentif dan deregulasi agar membangun iklim usaha yang kondusif.

Struktur tata ruang Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis koridor ini yang berupa gugus pulau. Sistem konektivitas ini akan mendukung seluruh Kegiatan Ekonomi Utama (Pariwisata, Peternakan, dan Perikanan) dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi seperti migas, tembaga, dan mangan. Namun perlu diperhatikan bahwa eksplorasi pertambangan tidak diprioritaskan pada koridor ini karena akan memberikan dampak negatif pada Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Peternakan, dan Perikanan. Prioritas peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan udara diberikan pada pelabuhan yang telah ada dan berdekatan dengan lokasi Kegiatan Ekonomi Utama agar lebih efektif, efisien, dan meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Peternakan, dan Perikanan terutama untuk lahan penggembalaan, efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk Kegiatan Ekonomi Utama Pariwisata, Perikanan, dan Peternakan terutama untuk lahan penggembalaan.